KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1USPRYPD

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

K							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 6 3 1				H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 4 5 3 9 4 4 9 0 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : NALENDRA NUGRAHA							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	2.050.200	2.050.200	0	5	102.510	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit O	rganisasi :						
C.4 Tanggal	:	2 8 dd 0 4 mm	2 0 2 2 <i>yyyy</i>				
C.5 Nama Penand	datangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan V	Vajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	